

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Indonesia telah resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang tidak lagi berada dalam kekuasaan penjajah Belanda maupun Jepang. Pembacaan Proklamasi ini dilaksanakan tidak lain karena suatu momentum yang tepat yang dijadikan celah oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia disebabkan oleh peristiwa bom atom yang menjatuhkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang yang dilakukan oleh Tentara Sekutu pada akhir masa Perang Dunia II, 6 dan 9 Agustus 1945. Kesempatan ini dijadikan oleh para pejuang kemerdekaan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan secara de facto Indonesia telah terlepas dari penjajah yang selama ini mengikatnya.

Belanda, sebagai negara bekas penjajah Indonesia ternyata masih menaruh hati kepada negara kita ini. Ia masih belum menerima jika Indonesia telah berbahagia mencapai kemerdekaannya, akibatnya Belanda melakukan segala macam cara agar Indonesia dapat kembali ke tangannya. Usaha-usaha yang dilakukan Belanda yaitu mulai dari penyerangan secara fisik atau peperangan sampai berdiplomasi yang ternyata hasilnya tetap saja membuat pihak Indonesia yang selalu dirugikan.

Banyak diplomasi-diplomasi yang telah dilakukan antara Belanda dan Indonesia sampai akhirnya perundingan-perundingan yang telah

dilakukan secara bersama-sama tidak juga mencapai titik temu, akhirnya memicu peperangan di antara keduanya, diantaranya terjadi Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II hingga akhirnya menimbulkan taktik Perang Gerilya dari pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Melihat semakin parahnya perlakuan Belanda terhadap Indonesia, hal ini membuat PBB dan Amerika Serikat bertindak serius terhadap Belanda. Dengan kecaman dari PBB, maka dilakukan kembali jalan diplomasi yaitu Konferensi Meja Bundar pada 2 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi ini merupakan konferensi lanjutan dari konferensi-konferensi atau perundingan yang telah dilakukan dan dalam konferensi ini lah yang menjadi tonggak bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara *de jure* dari pihak Belanda. Pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia akhirnya diberikan oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda dimulai pada tanggal 23 Agustus dan selesai pada 2 November 1949. Pengesahan dan tanda tangan pengakuan kedaulatan tersebut kemudian dilaksanakan pada 27 Desember 1949.

Mosi Integral adalah gagasan atau ide yang dikemukakan oleh Mohammad Natsir yang saat itu menjadi ketua fraksi Masjumi di DPR-RIS. Melihat jalan yang disepakati antara pihak Indonesia dan Belanda dalam pembentukan sistem Negara Indonesia yang berlaku adalah federasi dan tidak cocok dengan corak kemasyarakatan Indonesia. Dan bagi Natsir sistem Negara Kesatuan yang cocok bagi masyarakat Indonesia dan pada

saat itu banyak terjadi demonstrasi agar pemerintah tegas dalam mengambil sikap wujud pemerintahan Indonesia.

Bagi Natsir sebagai kedudukannya di DPR-RIS Mosi Integral garapan Natsir ini dianggap sebagai jalan pemerintah RIS untuk bersatu dalam naungan NKRI, dan bersatu dalam maksud ini adalah tidak perlu sampai membubarkan Negara bagian dan hanya melebur untuk merubah arah dan jalan baru sebagai Negara Kesatuan RI dan agar memiliki kedaulatan penuh atas Indonesia. Dalam pembentukan Mosi tersebut M. Natsir sangat banyak melakukan lobi politik dengan berbagai kalangan elit politik di seluruh fraksi yang ada di DPR-RIS. Dari yang berhaluan kiri hingga haluan kanan. Semua itu di lakukan Natsir agar terjalinnya persatuan pada 17 negara bagian RIS dan menjadi satu pemerinthan yang berasas kesatuan dan berbentuk NKRI. (Fauzan 2019)

Mosi Integral ini juga sebagai dasar peletak dimana sebagai pondasi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Integral dalam Mosi Natsir ini sendiri sebenarnya tidak ada kaitannya dengan *unitarisme* (kesatuan). Integral ini dalam artian penyelesaian masalah yang menyeluruh dan komperhensif dan sebagai sikap dan jalan pemerintah dalam menentukan arah politik yang kedalam dan keluar.

Oleh karena itu sejak januari 1950, banyak mengalir pernyataan dari daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Negara-negara bagian RIS dan lalu menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Setelah mendapat keyakinan bahwa usulannya untuk kembali kepada Negara Kesatuan RI

tidak ada yang menolak, M. Natsir kemudian menyampaikan pidatonya di hadapan sidang Parlemen RIS 3 April 1950. Dalam pidatonya Mohammad Natsir memakai bahasa yang halus, tetapi tidak kehilangan pesan politiknya yang sangat strategis. Pada akhir pidatonya itu, Natsir menyampaikan mosi yang berbunyi:

“menganjurkan kepada pemerintah untuk melakukan inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat, yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik waktu yang akhir-akhir ini, dengan cara integral dan program yang tertentu”

Mosi tersebut yang kemudian dikenal dengan nama “Mosi Integral Natsir”. Didukung dan di tanda tangani oleh seluruh anggota DPR-RIS dan di terima oleh parlemen pada tanggal yang sama.

Setelah Mosi Integral Natsir disampaikan, berlanjut pada konferensi antara pihak RIS yang diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta, yang juga mewakili kepentingan Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur, dengan pihak RI yang diwakili oleh Perdana Menteri Abdul Halim. Konferensi itu menghasilkan Piagam Persetujuan antara RIS dan RI yang ditandatangani pada 19 Mei 1950, isinya :

“Bahwa kami menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, atas pokok-pokok :

- a. Ke dalam : menyempurnakan penghidupan rakyat dan persatuan bangsa Indonesia,*
- b. Ke luar : memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain.*

Bahwa kami menyetujui pembuatan Undang-Undang Dasar Sementara bagi Negara Kesatuan ini oleh suatu panitia yang dibentuk untuk itu”.

Selanjutnya di bentuk lah sebuah panitia bersama RIS-RI yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI. Dari pihak RIS dipimpin oleh Menteri Kehakiman Soepomo, sedangkan pihak RI dipimpin Perdana Menteri Abdul Halim. Panitia berhasil menyelesaikan tugasnya pada 20 Juli 1950. Rencana UUD NKRI ini disetujui oleh BP-KNIP RI dalam sidangnya pada 12 Agustus 1950, sedangkan oleh DPR dan Senat RIS dalam sidangnya pada 14 Agustus 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyetujui dan menandatangani Rancangan UUD itu menjadi Undang-Undang Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih dikenal dengan nama UUDS 1950.

Pada 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan kembali. Negara Kesatuan RI baru ini dianggap oleh sebagian besar rakyat Indonesia sebagai kelanjutan dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Untuk memimpin NKRI ini, Soekarno terpilih kembali sebagai Presiden, dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Alasan peneliti mengangkat tema ini antara lain masa sekarang masih banyak generasi muda melupakan tentang peristiwa yang menurut mayoritas orang tidak menarik. Namun, di balik terjadinya peristiwa tersebut memiliki dampak besar hingga sekarang dan juga keunikan *strategi* para tokoh bangsa yang dapat membuat hingga Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya penelitian ini pula penulis berharap para generasi muda dapat melihat secara luas dalam suatu peristiwa di mana seluruh elemen berperan aktif dalam menyatukan

Indonesia walaupun melewati berbagai rintangan dan halangan hingga sampai pada titik yang kita kenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Fauzan 2019)

Alasan lain juga banyak tokoh bangsa berpidato dengan berbagai topik. Namun, tidak jarang isinya menunjukkan sisi skeptisme dalam berbangsa. Yang digambarkan adalah ketakutan demi ketakutan, namun tidak ada yang benar-benar mampu memberikan solusi agar ketakutan ini hilang. Selama ini, jika sebelum berkuasa para tokoh sering berpidato tentang ketakutan ataupun kegamangan misalnya, maka setelah berkuasa, mereka justru mengulang ketakutan yang sama.

Dalam konteks berpidato, Mohammad Natsir adalah tokoh bangsa yang patut dijadikan contoh. Bila disimak dengan seksama isi Pidato Mosi Integral Natsir, tergambar jelas bahwa pokok pikiran yang disampaikannya mengandung nilai-nilai kebijaksanaan. Natsir datang dengan diksi persatuan di atas perbedaan. Natsir tidak berpidato untuk mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Pun, Natsir tidak menyodorkan dirinya sebagai solusi melainkan tetap dengan objektif memberikan jalan kepada Dwitunggal agar dapat terus mempersatukan bangsa.

Natsir berpidato atas dasar tidak ingin terpecah-belah. Meskipun Natsir tidak secara eksplisit menyebutkan kata “kesatuan”, namun bila disimak isi pidato Mosi Integral tersebut mengamanahkan persatuan yang tidak bisa di tawar-tawar. (Fauzan 2019)

Pidato yang diucapkan Natsir tidak muncul dari semangat 'keakuan'. Natsir berdiri sebagai poros tengah. Hal ini tergambar dari upayanya menyatukan pendapat dengan banyak tokoh yang dianggap 'paling kanan' dan 'paling kiri' pada saat itu. Sebelum menyampaikan pidatonya, Natsir telah terlebih dahulu melakukan diskusi secara mendalam dengan Ir. Sakirman dari Partai Komunis Indonesia, dan Tuan Sahetapy Engel sebagai wakil dari BFO. Artinya, Natsir melakukan dialektika mutualis dengan tokoh-tokoh yang saling berseberangan.

Mosi Integral Natsir tidak berisi sikap pesimis terhadap bangsa ini. Meskipun Natsir paham bahwa Indonesia berada dalam kondisi memprihatinkan saat itu namun ia tidak berhenti di titik skeptisme semata. Ia justru berhasil menunjukkan solusi tentang cara berbangsa yang lebih baik. (Fauzan 2019)

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini berdasarkan kaidah umum yang digunakan dalam penelitian sejarah yakni aspek ruang (spasial) dan waktu (temporal). Penulis akan mulai membahas sedikit kondisi pasca perang revolusi hingga Indonesia kembali memakai bentuk Negara Kesatuan. Di mana Mosi Integral dalam artian Pidato yang disampaikan oleh Mohammad Natsir pada tanggal 3 April 1950 yang dimana pidato tersebut di jadikan acuan yang rasional bagi 17 negara bagian RIS untuk melebur dan menjadi

jalan kembali menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Proklamasi ke-dua bagi Indonesia.

Sedangkan batasan temporal yang digunakan adalah kurun waktu antara 1949-1950 yang dimana sebelum 1950 Indonesia memiliki sistem Pemerintahan RIS dan belum mengadopsi Negara kesatuan yang sebenarnya lebih cocok dan sesuai dengan Proklamasi 1945.

2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini berfokus pada keunikan dan kepiawaian Mohammad Natsir dalam meracik dan menuangkan gagasannya dalam Mosi Integral yang bisa di bilang bermain “*strategi*” politik untuk menuju jalan dan arah Pemerintahan Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta kerelaannya para anggota parlemen yang dimana lebih mementingkan kepentingan Indonesia di banding kepentingan golongan mereka atau pun partai mereka. Dari uraian dasar pemikiran di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi Mosi Integral sebagai jalan kembali menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Memahami dan mendeskripsikan perkembangan dan pandangan dari di kemukakannya pidato oleh Mohammad Natsir di depan

sidang DPR-RIS pada 3 April 1950 yang nanti dikenal dengan “Mosi Integral Natsir”. Dan juga sebagai jalan Indonesia kembali menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai Proklamasi Ke-dua bagi Bangsa Indonesia.

- b. Sebagai sarana memperkenalkan tokoh Islam dalam yang berperan dalam membuat dasar NKRI yang kita kenal hingga hari ini.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Kegunaan dari Penelitian ini antara lain selain untuk memperkaya wawasan dan khasana tentang sejarah dari para cendikiawan dan kelihaihan para *Founding Father* Indonesai dalam meramu sistem Pemerintahan Indonesia. Dan berbagai dinamika perpolitikan dari masa RIS menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberi anggapan dan pandangan baru bagi para pemikir islam masa lalu untuk di contoh bagi para generasi selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa di jadikan bahan ajar dalam pembelajaran baik di tingkat SMA maupun di tingkat Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Khususnya yang berkaitan dengan Sejarah Indonesia Masa Orde Lama.

D. Kerangka Analisis

Dalam memahami pikiran Mohammad Natsir dalam meramu mosi dalam parlemen dan bisa membuat kembali penyatuan dari RIS menuju NKRI. Penulis menggunakan penulisan naratif dengan pendekatan teori tentang susunan Negara Kesatuan dan fungsi-fungsi lembaga perwakilan di Parlemen. Hal ini dikarenakan "Mosi Integral Natsir" di Parlemen RIS pada 3 April 1950 telah Negara Indonesia bersusunan Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan. Sementara itu, kapasitas Mohammad Natsir sewaktu mengajukan gagasan tersebut adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS). Dengan demikian, kerangka teori akan lebih memfokuskan pada teori-teori yang berkaitan dengan susunan Negara terutama susunan Negara Kesatuan serta teori-teori yang berkaitan dengan fungsi lembaga perwakilan di Parlemen.

1. Negara Kesatuan

Sebelum lebih lanjut menguraikan kerangka teori tentang Negara Kesatuan, dirasa perlu untuk diungkap terlebih dahulu tentang istilah yang selalu mengikuti perkataan "kesatuan" atau "federasi", yakni istilah "bentuk negara" Sehingga dalam setiap tulisannya, maka istilah "bentuk negara" tersebut akan terangkai dalam kata-kata "bentuk negara kesatuan" atau "bentuk negara federal Namun di sisi lain istilah tersebut juga digunakan untuk menunjukkan bahwa negara tertentu itu Republik atau Monarchi

Dengan demikian maka istilah tersebut dapat menimbulkan kerancuan di dalam pemakaiannya.

Maka untuk mencegah kerancuan dalam menggunakan istilah bentuk negara tersebut perlu adanya pembedaan secara tegas di dalam penggunaannya. Oleh karena itu, Mohammad Kusnardi melakukan pembedaan penggunaan istilah tersebut secara jelas. Menurutnya, bahwa istilah "bentuk negara ditujukan kepada pengertian bahwa negara tersebut adalah Republik atau Monarchi. Sedangkan istilah yang tepat untuk menunjuk Negara Kesatuan atau Negara Federal adalah dengan istilah "susunan." Namun yang berkembang di masyarakat umum dalam penggunaan istilah "bentuk negara adalah berkaitan dengan Negara Kesatuan ataupun Negara Federal. Dan sementara itu, pengertian Republik maupun Monarki berkaitan dengan bentuk pemerintahannya.(Kusnardi, 1985)

E. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian sejarah yang lazim digunakan, mengacu pada sistematis penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah meliputi lima tahap, yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah terbagi menjadi 2 yaitu; kritik intern dan ekstern, otentisitas sumber) intepretasi (analisis dan sintesis) dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013).

a) Heuristik

Tahap Heuristik adalah kegiatan untuk mencari sumber-sumber masa lampau yang berupa data-data sejarah. Kegiatan ini ditujukan untuk menemukan dan mengumpulkan jejak dari setiap peristiwa sejarah yang sebenarnya. Sumber-sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun tempat-tempat yang dikunjungi peneliti antara lain; Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

b) Kritik Sumber

Setelah melalui tahap Heuristik, langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Di dalam penulisan sejarah, tahapan kritik sumber, dilakukan keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kredibilitas sumber melalui kritik intern. bertujuan untuk mengetahui kredibilitas sumber.

Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan uji atas keaslian atau otentisitas sumber yang meliputi tanggal, pengarang, melihat bahan material seperti tulisan atau ketikan, stempel, dan tanda tangan, jenis kertas dan tinta yang digunakan. Sedangkan untuk kritik intern penulis melakukan uji analisis terhadap kredibilitas teks dan terbitan.

Penelitian ini akan melakukan kritik interen bagaimana sumber tersebut ditulis sesuai perspektif penulis sumber apakah penulis tersebut berada pada zaman RIS hingga Orde Lama, atau memiliki latar belakang berada di dalam organisasi tersebut, dengan membandingkan sumber lain yang membahas periode atau organisasi yang sama.

c) Interpretasi

Tahap ketiga adalah interpretasi atau menafsirkan fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran Mosi Integral, dan dinamika yang mewarnai pergumulan dan pertentangan Negara-negara bagian yang masih memilih bentuk Negara RIS.

d) Historiografi

Hal yang dilakukan adalah menyusun fakta-fakta sejarah menjadi suatu karya sejarah. Setelah melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, dan menafsirkan yang kemudian dinarasikan kembali menjadi suatu peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan.

2. Sumber Penelitian

Sebagai dasar penelitian, penulis menggunakan beberapa buku antara lain; M. Dzulfikriddin, (2010). *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung : Mizan. Murjoko, Ahmad. (2020). *Mosi Integral Natsir 1950*. Bandung: Persis Pers. Waluyo.

Dari “Pemberontak” Menjadi Pahlawan Nasional : Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia. Yogyakarta : Ombak. 2005.

Serta beberapa jurnal yang sudah dijadikan seminar nasional; Irpan Fauzan, P. (2019). Mohamad Natsir: Dari PERSIS, Masyumi, Hingga Mosi Integral NKRI. Pepen NKRI. Zakaria Aceng. (2017). Mosi Integral Natsir Proklamasi Kedua Kemerdekaan. *Majalah Da'wah Islamiyah Risalah.*

Pidato Natsir pada sidang RIS 3 April 1950 menjadi sumber utama penulis karena terkait topik agar penulis bisa mengetahui apa buah fikir Natsir dan bagaimana Natsir bisa meyakinkan anggota sidang yang lain.

Selain buku-buku di atas juga penulis sudah sering bersinggungan dengan topik Mohammad Natsir dan Perkembangan Politik Indonesia dari sudut pandang tokoh-tokoh Islam antara lain dalam membuat jurnal atau pun artikel dalam masa perkuliahan.

3. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah ;

Pada bab satu penulis akan memaparkan dan menjelaskan dasar pemikiran yang merujuk sebagai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi. Pada bab ini juga akan membahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, metode yang akan

peneliti gunakan dalam penelitian ini, sumber yang akan digunakan serta sistematika penulisan penelitian.

Pada bab kedua, penulis akan membahas Kondisi Republik Indonesia pasca perang revolusi, dan Pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia secara *de jure*.

Pada bab ketiga penelitian ini penulis akan membahas tentang Bagaimana Mosi Integral 1950 oleh Mohammad Natsir lahir dari Konsolidasi politik pasca keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), dilanjutkan tentang intrik pro-kontra para anggota parlemen dalam menetapkan bentuk negara dengan munculnya kelompok pro kesatuan dan pro federasi. Dan yang terakhir penulis akan sedikit menyinggung tentang mosi kesatuan Supomo yang menjadi salah satu landasan bagi Mohammad Natsir dalam merumuskan Mosi Integralnya.

Pada bab keempat penulis akan menyajikan kesimpulan dari penelitian setiap bab. Kesimpulan yang di sajikan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah di ajukan pada bab sebelumnya yaitu dari bab ke dua dan bab ketiga.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*